

## Menuju Masa Depan yang Berkelanjutan: Pelestarian Lingkungan, Transisi Energi, dan Kesejahteraan Masyarakat



Foto: Dok. PT PLN (Detik Finance)

Pada Juni 2024 SMERU menyelenggarakan seri webinar **Forum Kajian Pembangunan (FKP)** yang mempertemukan peneliti, akademisi, pakar, masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan. Forum kali ini mendiskusikan strategi menyeimbangkan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan peran pemerintah daerah dalam transisi energi yang berkeadilan. Terima kasih kepada para peserta dan pembicara seri webinar FKP Juni 2024. Semoga diskusi ini dapat membantu menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi pengelolaan kawasan konservasi, kesejahteraan masyarakat, dan transisi energi yang berkeadilan di Indonesia.



### Mendorong Peningkatan Kesejahteraan di Kawasan Konservasi Perairan

Seri 1 - Kamis, 20 Juni 2024

Tingkat kemiskinan dan ketimpangan di desa dekat kawasan konservasi lebih tinggi dibandingkan desa nonkonservasi. Menurut Badan Pusat Statistik (2021), sekitar 1,3 juta jiwa dari 10,86 juta penduduk miskin di Indonesia tinggal di wilayah pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi perairan perlu memprioritaskan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Webinar FKP SMERU 2024 Seri 1 ini membahas cara menyeimbangkan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. [Klik gambar](#) untuk menonton webinarnya.



### Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia: Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah

Seri 2 - Rabu, 26 Juni 2024

Ambisi Indonesia untuk mencapai 23% bauran energi baru dan terbarukan (EBT) pada 2025 masih terbilang panjang dan penuh tantangan. Untuk mengakselerasi transisi energi, pemerintah daerah perlu dilibatkan. Temuan awal studi SMERU menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang ada membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam transisi energi. Webinar FKP SMERU 2024 Seri 2 ini membahas kebijakan dan upaya yang diperlukan agar pemerintah daerah dapat lebih aktif berpartisipasi dalam transisi energi yang berkeadilan. [Klik gambar](#) untuk menonton webinarnya.

### Penelitian Terkini



Foto: Kabar Sumbar

### Pengumpulan Data dan Analisis Sosial-Ekonomi pada Masyarakat Pascapenambangan Batu Bara di Sumatera Barat

Sawahlunto dipilih menjadi lokasi proyek percontohan *Just Transition* (Transisi Berkeadilan) karena kota ini menghadirkan kesempatan unik untuk menguji dan menerapkan prinsip-prinsip transisi berkeadilan dalam konteks nyata. Bagaimana kota yang dulunya berjaya sebagai pusat penambangan batu bara mendiversifikasi ekonominya setelah penambangan dihentikan? SMERU mengkaji dampak penutupan tambang batu bara di Sawahlunto, dan cara mewujudkan transisi yang berkeadilan menuju ekonomi lokal pascapenambangan.



Foto: SMERU



Foto: SMERU



Dua ahli bidang pensiun dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Wouter De Tavernier (Ekonom Pensiun) dan Andre Reilly (Analisis Pensiun), mengunjungi SMERU pada 10 Juni untuk berdiskusi mengenai penduduk lansia dan dana pensiun di Indonesia. SMERU menyampaikan bahwa faktor budaya dan rendahnya literasi keuangan menjadi penyebab utama masyarakat Indonesia tidak memprioritaskan dana pensiun. Dalam pertemuan tersebut, SMERU diwakili oleh Athia Yumna (Direktur Penelitian dan Penjangkauan), Ulfah Alifia (Kepala Departemen Penelitian), dan Affandi Ismail (Peneliti).

SMERU menyelenggarakan seminar bertopik *"China's New Growth Strategy: Implications for Middle-Income Economies"* dengan pembicara Ian Coxhead, *Senior Research Fellow* di Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO), pada 19 Juni. Ian memaparkan penelitiannya tentang dampak strategi pertumbuhan ekonomi baru Tiongkok terhadap negara-negara di sekitarnya. Penelitian itu memprediksi bahwa strategi ekonomi baru Tiongkok akan mengakibatkan negara-negara berkembang, seperti Indonesia, kehilangan keunggulan kompetitif di sektor manufaktur yang padat modal.

Direktur SMERU, Widjajanti Isdijoso, diundang sebagai narasumber dalam diskusi bertema "Sepuluh Tahun Pembangunan Infrastruktur Era Presiden Jokowi: Antara Harapan, Kenyataan dan Catatan" pada 21–22 Juni. Diskusi ini diselenggarakan oleh Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI untuk mengumpulkan masukan mengenai dampak dan catatan perbaikan terkait pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dan kesehatan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (2015–2024). Dalam paparannya, Widjajanti antara lain menyampaikan bahwa kesenjangan antarkelompok kesejahteraan menyempit, tetapi masih ada kesenjangan antara wilayah barat dan timur Indonesia.

## Publikasi Terbaru



Foto: Navita Eka Syaputri

### **Protecting Our Future: Strengthening Social Protection for Children during the Post-COVID-19 Recovery Period**

Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak negatif yang besar pada anak, di antaranya meningkatnya kemiskinan anak serta terganggunya sekolah dan layanan bagi anak-anak penyandang disabilitas. Namun, perlindungan sosial yang ada belum menjangkau seluruh anak yang terdampak pandemi. Catatan kebijakan ini menyajikan rekomendasi untuk memperkuat sistem perlindungan sosial bagi anak, khususnya dalam menjamin kesejahteraan mereka. [Klik gambar](#) untuk mengetahui rekomendasinya.



Foto: Gisalka Kib. Bloro

### **Does Decentralisation Promote Learning? Local Political Settlements and Education Policies in Indonesia**

Artikel ini menganalisis pembatasan kewenangan kepala daerah di Indonesia dan pengaruhnya terhadap pengembangan kapasitas birokrat, khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan. Seperti apa bentuk pembatasan kewenangan tersebut? Bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja birokrat, khususnya dalam melahirkan inovasi pendidikan di tingkat daerah? [Klik gambar](#) untuk membacanya.